

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	25
D. Kajian Pustaka	26
E. Langkah-Langkah Penelitian	43
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG TEORI NEGARA	
HUKUM, TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN TEORI	
SISTEM PERADILAN PIDANA	49
A. Teori Negara Hukum	49
1. Sejarah Negara Hukum	49
2. Pengertian Negara Hukum	52
3. Konsep Negara Hukum	54
B. Teori Penegakan Hukum	60
1. Pengertian Penegakan Hukum	60
2. Esensi Fundamen Penegakan Hukum	62
C. Sistem Peradilan Pidana	65
1. Istilah dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana	65
2. Model-model Sistem Peradilan Pidana	68
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana	70

BAB III TINJAUAN TEORITIS YURISDIKSI

KOMISI PEMPERANTASAN KORUPSI (KPK)

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG (TPPU) 73

- A. Yurisdiksi 73
 - 1. Pengertian Yurisdiksi 73
 - 2. Prinsip-prinsip Yurisdiksi 74
 - 3. Jenis-jenis Yurisdiksi 75
- B. Tindak Pencucian Uang 76
 - 1. Sejarah dan Pengertian Pencucian Uang 76
 - 2. Tahapan dan Mekanisme Pencucian Uang 80
 - 3. Metode Praktek dan Faktor-faktor Pencucian Uang 82
 - 4. Dampak Kerugian dan Alasan Memerangi Pencucian Uang 86
 - 5. Pengaturan Pencucian Uang di Indonesia 88
- C. Kewenangan KPK Dalam Penyidikan dan Penuntutan TPPU 103

BAB IV KAJIAN HUKUM YURISDIKSI KPK DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

- TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 105**
- A. Proses Penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana pencucian
uang yang dilakukan oleh jaksa KPK 105
- B. Akibat hukum penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang
yang dilakukan oleh jaksa KPK 121
- C. Pandangan Majelis Hakim Terhadap Penuntutan TPPU Oleh KPK..126

BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Sistem Peradilan Pidana 68

